

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Sukagalih, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi PIPPK di Kelurahan Sukagalih telah berhasil terlaksana. Keberhasilan implementasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor Komunikasi yang dilakukan di Kelurahan Sukagalih menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan termasuk pada kategori baik. Informasi terkait PIPPK telah berhasil dikomunikasikan dengan jelas melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat Kewilayahan. Hal ini dibuktikan dengan LKK dan masyarakat Kelurahan Sukagalih mengetahui adanya kebijakan PIPPK ini. Selain itu, informasi terkait PIPPK berhasil disampaikan secara konsisten yang ditandai dengan tidak adanya simpang siur informasi dan LKK mengetahui prosedur apa yang tepat untuk diikuti dalam pelaksanaan PIPPK.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sumber daya termasuk kedalam kategori baik. Artinya bahwa Kelurahan Sukagalih telah memiliki sarana dan prasarana, fasilitas yang memadai serta informasi yang cukup dalam pelaksanaan program PIPPK. Kegiatan PIPPK mendapatkan pendanaan dari pemerintah sesuai dengan usulan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh masyarakat dan disetujui oleh PPK.

Selain itu, LKK sepenuhnya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK tahun 2019 dalam pembuatan proposal usulan program, usulan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan, hingga pada pelaporan kegiatan sehingga Kelurahan Sukagalih memiliki informasi yang cukup dalam melaksanakan program PIPPK.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam pelaksanaan program PIPPK di kelurahan Sukagalih, faktor disposisi berada pada kategori baik. Aparat Kewilayahan dan LKK memahami tujuan PIPPK dengan baik sehingga hal tersebut mendorong keduanya untuk melaksanakan kegiatan PIPPK dengan antusias. Adanya kemauan implementor untuk melaksanakan PIPPK dapat dibuktikan dengan tingginya penyerapan anggaran kegiatan PIPPK di Kelurahan Sukagalih yang berarti bahwa program yang ditargetkan hampir sepenuhnya tercapai. Pencapaian tersebut tentunya didukung oleh usaha dan upaya berbagai pihak di Kelurahan Sukagalih.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan program PIPPK di Kelurahan Sukagalih terdapat SOP yang dimuat dalam Petunjuk Teknis PIPPK 2019. Kelurahan Sukagalih berpedoman pada Petunjuk Teknis tersebut mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga pada pelaporan kegiatan. Petunjuk Teknis memiliki informasi yang lengkap mengenai prosedur pelaksanaan PIPPK yang tepat. Untuk indikator fragmentasi, Kelurahan Sukagalih mempunyai pembagian tugas yang jelas dan terstruktur namun tidak terlalu luas karna hanya mencakup lingkup kelurahan.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan, penyerapan anggaran PIPPK di Kelurahan Sukagalih sudah cukup baik yaitu berada diatas 90 persen. Penyerapan anggaran yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kinerja Kelurahan Sukagalih dalam mencapai target program sudah baik. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah terus mempertahankan kinerja yang baik dalam pelaksanaan PIPPK dan menciptakan program inovatif demi kemajuan daerah Kelurahan Sukagalih.
2. Untuk faktor struktur birokrasi, peneliti menemukan bahwa dasar hukum serta petunjuk teknis pelaksanaan PIPPK sering mengalami perubahan. Adanya ketidakpastian hukum ini membuat pelaksana PIPPK bingung diawal ketika akan melakukan pengusulan program. Untuk itu, Aparatur Kewilayahan sebaiknya melakukan sosialisasi kembali serta rapat koordinasi dengan LKK sehingga LKK dapat mengetahui secara rinci akan kebijakan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara,S. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia: Bandung.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly INC.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Widya Karya: Semarang.
- Hill, M. & Hube, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London.
- Ripley, R.B. & G.A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* . Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Silalahi, U. *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil untuk Penelitian Sosial Kuntitatif*. Bandung: Refika Aditama,2018.
- Taufikurokhman.2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama: Jakarta Pusat.

Jurnal :

- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1,7.

Internet :

- Juknis PIPPK 2015.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/bijak>, (5.12.20).
- M. Naufal Hafizh, “Oded: Pelaksanaan PIPPK harus semakin membaik”, <https://ayobandung.com/read/2019/03/23/47732/oded-pelaksanaan-pippk-harus-semakin-membaik> diakses pada 09-06-2021.
- E. Goro Leba, “Implementasi Kebijakan Publik”, https://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK
- Peraturan Walikota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang PIPPK.
- Perwal Kota Bandung No. 436 tahun 2015 tentang PIPPK.